

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Dicoret, Biaya Influencer Senilai Rp 5 Miliar

Gambir, Warta Kota

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta membatalkan alokasi dana untuk membayar lima influencer pada 2020 yang nilainya mencapai Rp 5 miliar.

Sedianya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal merekrut lima influencer untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Ibu Kota DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikutnya (*followers*) di media sosial.

Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, Asiantoro, menyatakan, usulan melalui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 itu sudah dicoret atau dibatalkan. Artinya, Pemprov DKI Jakarta tidak akan akan menyewa jasa influencer untuk membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta. "Yang jelas sekarang anggaran itu sudah tidak ada atau dihapus," kata Asiantoro saat dihubungi *Warta Kota* pada Minggu (27/10).

Asiantoro mengatakan, rencananya lima influencer itu direkrut yang memiliki jumlah *followers* yang banyak. Namun, Asiantoro enggan menjelaskan jumlah minimum *followers* influencer itu yang akan diundang Pemprov DKI Jakarta. "Tadinya, influencer luar negeri yang mempunyai *followers* banyak, tapi sekarang sudah *nggak* ada kegiatan itu," ujar Asiantoro.

Dalam kesempatan itu, Asiantoro juga enggan menjelaskan nama lima influencer yang akan diundang Pemprov DKI Jakarta. Dia beralasan, dinas belum menentukan sosoknya karena baru sebatas pengajuan dana melalui KUA-PPAS. "Belum ada penentuannya, baru melihat sebatas *followers*-nya saja. Yang jelas sudah dicoret sejak awal Oktober lalu," imbuhnya.

Sebelumnya, Dinas Pari-

wisata dan Kebudayaan DKI Jakarta mengusulkan anggaran sekitar Rp 5 miliar untuk penyelenggaraan aktivitas promosi pariwisata dan kebudayaan melalui media sosial. Anggaran sebesar itu, dibayarkan kepada lima influencer luar negeri yang memiliki pengikut (*followers*) terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp 1 miliar.

Berdasarkan data yang

diterima *Warta Kota*, melalui KUA-PPAS 2020, dana yang dianggarkan sebesar Rp 5.008.691.930. Lima orang influencer itu bertugas mempromosikan pariwisata dan kebudayaan melalui akun media sosial mereka. Adapun lokasi promosi dan kebudayaan itu berlokasi di DKI Jakarta. Mereka direkrut karena dianggap bisa menjadi panutan bagi warganet yang mengikutinya di media sosial. (faf)

Bentuk Pemborosan Anggaran

Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansyah, menilai usulan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta dalam mengundang influencer sebesar Rp 5 miliar merupakan bentuk pemborosan anggaran. Pengamat dari Universitas Trisakti ini menyebut, seharusnya pemerintah menggandeng swasta dalam membantu mempromosikan pariwisata dan kebudayaan Ibu Kota.

"Seharusnya Pemprov DKI Jakarta melibatkan swasta, tanpa harus memakai APBD. Kalau bisa harus meniru Singapura dan Bangkok yang mampu menjual pariwisata mereka dengan baik melalui kerja sama

dengan swasta," ujar Trubus, Minggu (27/10).

Menurut dia, kerja sama dengan melibatkan swasta justru menguntungkan pemerintah. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk promosi karena swasta akan membantunya lewat dana tanggung jawaban sosial atau *corporate social responsibility* (CSR).

Sebagai pembuat kebijakan, DKI memiliki kuasa untuk mengajak pihak swasta bekerja sama dalam mempromosikan pariwisata dan kebudayaan.

Di sisi lain, swasta akan menyambut baik ajakan Pemprov DKI Jakarta karena kehadiran wisatawan juga berimplikasi terhadap produk dari usaha mereka. "*Nggak* harus pakai APBD, justru

kalau ini dipaksakan saya malah melihatnya ada upaya pemanfaatan APBD dan itu bisa menjadi dana siluman," katanya.

"Perlu diingat, APBD itu bukan duit Gubernur atau DPRD. Tapi duit masyarakat, jadi harus betul-betul dimanfaatkan untuk masyarakat," tambahnya. Dia menyarankan Pemprov DKI Jakarta untuk meningkatkan koordinasi dengan swasta dalam upaya mempromosikan pariwisata dan kebudayaan. Kata dia, perusahaan swasta di DKI sangat banyak dan berpotensi bisa diajak bekerja sama dalam bidang ini. "Kinerja dinas yang saya anggap kurang, harusnya dinas bekerja lebih maksimal melibatkan swasta tanpa mengandalkan anggaran," imbuhnya. (faf)